

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Pemanasan global akibat emisi gas karbon atau rumah kaca merupakan isu lingkungan global yang dewasa ini dinilai termasuk dalam isu lingkungan global yang paling krusial. Adapun komponen yang paling dominan dan persisten adalah karbon dioksida. Permasalahan emisi gas rumah kaca ini timbul dari berbagai penggunaan bahan bakar fosil yang menjadi bahan bakar dasar dari kebutuhan energy yang dipakai dalam setiap jenis aktivitas industry modern. Dewasa ini, seiring dengan semakin pesatnya pengembangan industri dan teknologi, membuat penggunaan bahan bakar fossil juga semakin meningkat. Oleh karena itu, ancaman dampak buruk atas terjadinya perubahan iklim semakin besar pula jika tidak dilakukan upaya pencegahan atau adaptasi dampak perubahan iklim di masa mendatang, utamanya di negara-negara yang rentang terhadap dampak perubahan iklim, misalnya seperti negara-negara berkembang dengan pembangunan dan tingkat kesejahteraan dalam berbagai aspek yang rendah. Secara umum, pemanasan global dapat disebabkan karena adanya gangguan siklus karbon, misalnya seperti deforestasi serta permasalahan penggunaan lahan juga. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan sejumlah langkah untuk mengantisipasi dampak perubahan iklim di masa depan. Beberapa program berskala global terkait upaya tersebut sudah pernah dilakukan sebagai bentuk dari kerja sama dan keseriusan negara-negara di dunia menanggapi isu perubahan iklim.

#### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Sebagai salah satu upaya negara-negara di dunia dalam rangka mengatasi dampak perubahan iklim, dibentuklah Protokol Kyoto yang diadopsi di Kyoto, Jepang, pada 11 Desember 1997 dan mulai berlaku pada 16 Februari 2005. Kesepakatan ini mengikat negara-negara yang tergabung dengan menetapkan target pengurangan emisi. Mengakui bahwa negara-negara maju pada dasarnya bertanggung jawab atas tingginya tingkat emisi GRK di atmosfer sebagai akibat

dari lebih dari 150 tahun kegiatan industri, Protokol Kyoto menempatkan beban yang lebih berat pada negara-negara maju di bawah prinsip "tanggung jawab bersama tetapi berbeda". Namun, AS sebagai negara adidaya yang seharusnya menunjukkan sikap kepemimpinannya kepada negara-negara di dunia justru menolak untuk turut meratifikasi kesepakatan tersebut pada masa kepemimpinan Bill Clinton, salah satu presiden yang berasal dari Partai Demokrat. Meskipun Clinton berasal dari Partai Demokrat, namun dominasi kekuasaan atau mayoritas kursi Kongres AS pada masa itu dikuasai oleh Partai Republik. Keputusan tersebut tidak pernah sampai ke senat untuk secara resmi diratifikasi. Setelah pergantian kekuasaan dari era Clinton ke era kepemimpinan George W Bush dari Partai Republik, AS memutuskan untuk keluar dari Protokol Kyoto pada 29 Maret 2001.<sup>1</sup>

Pada 12 Desember 2015 di Perancis, *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC) mengesahkan kesepakatan baru sebagai agenda lanjutan atas berakhirnya Protokol Kyoto, yakni *Paris Agreement* berbentuk COP21 yang menjadi tonggak penting dalam tata kelola iklim global di mana kesepakatan tersebut memuat tujuan global untuk adaptasi perubahan iklim, termasuk secara terpisah menyebut tentang kerusakan dan kerugian akan dampak perubahan iklim (*Loss and Damage – red*). Perjanjian ini mulai berlaku pada hari ke-30 setelah tanggal pemberlakuan di mana setidaknya 55 Pihak telah menyerahkan instrumen ratifikasi, penerimaan, persetujuan atau akses. Sejauh ini, *Paris Agreement* telah diratifikasi oleh 183 Pihak dari 197 Pihak UNFCCC.<sup>2</sup>

Sebagai negara adidaya, AS memiliki peran penting dalam *Paris Agreement* di mana AS merupakan negara

---

<sup>1</sup> UNTC, "Paris Agreement", Chapter XXVII, diakses dari [https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtds\\_g\\_no=XXVII-7 d&chapter=27&lang=en&clang=en](https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtds_g_no=XXVII-7 d&chapter=27&lang=en&clang=en) pada tanggal 9 November 2018 pukul 09.34

<sup>2</sup> Op. cit.

penyumbang gas emisi karbon terbesar kedua setelah China. AS diketahui menyumbang hingga lebih dari seperlima dari semua emisi karbon yang dihindari oleh negara-negara di dunia dan menjanjikan setidaknya penurunan 21% emisi karbon di bawah *Paris Agreement*. Pada 3 September 2016, AS menyetujui *Paris Agreement* yang diadopsi melalui *Conference of Parties ke-21 (COP21) UNFCCC* 2015 di Paris, Prancis (UNFCCC 2016). Langkah tersebut merupakan suatu bentuk terobosan dibandingkan dengan upaya consensus UNFCCC sebelumnya, yakni Protokol Kyoto (1997)<sup>3</sup>. Di bawah kepemimpinan Obama dari Partai Demokrat, kegagalan dalam Protokol Kyoto tergantikan dengan diratifikasinya *Paris Agreement*. AS menjadi salah satu negara yang paling awal meratifikasi *Paris Agreement*, sekaligus menjadi kontributor paling aktif dalam pendanaan dan lain-lain.

Obama menilai bahwa langkah-langkah dalam merespon *climate change* sangat diperlukan, sebab Obama meyakini bahwa isu *climate change* merupakan salah satu isu ancaman keamanan yang nyata. Namun, sikap unilateral Obama ini mendapat kritik dari kelompok skeptis terhadap isu *climate change* dan pertentangan dari mayoritas anggota kongres yang dikuasai oleh Partai Demokrat serta 24 gubernur negara bagian AS terkait persetujuan Obama komitmen pendanaan dalam *Paris Agreement* dan lain-lain. Persetujuan tersebut pun akhirnya ditangguhkan sementara. Diketahui bahwa anggota Kongres AS dari Partai Demokrat mendukung keputusan Obama dan memahami bahwa ancaman *climate change* adalah nyata sehingga dengan dukungan politik yang cukup, sehingga Obama memutuskan untuk tetap menetapkan langkah dengan meratifikasi *Paris Agreement* meskipun setelah perundingan panjang tetap saja mendapat pertentangan dari mayoritas anggota Kongres AS.

Persetujuan Obama dalam *Paris Agreement* tersebut menimbulkan perbedaan fundamental pada definisi

---

<sup>3</sup> Tedi Bagus Prasetyo Mulyo, “*Persetujuan Barack Obama terhadap Paris Agreement 2015*”, Universitas Airlangga, hal 2

kepentingan nasional dan strategi mencapai kepentingan antara ideologi liberal dan konservatif. Konfigurasi ideolog politik liberal Obama yang inklusif, kooperatif, dan multilateralis membentuk persepsi Obama terhadap perubahan iklim dan menjadikannya sebagai salah satu agenda utama.<sup>4</sup> Dengan dukungan dari pendukung partai Demokrat yang pro terhadap isu perubahan iklim dan sebagian anggota Kongres yang berasal dari kubu Demokrat, Obama menjadi salah satu aktor utama yang gencar menggalakkan kampanye mengenai pentingnya isu perubahan iklim. Bahkan, demi mewujudkan upaya tersebut, Obama telah menempuh langkah-langkah penting, salah satunya adalah dengan dibuatnya komitmen kerjasama untuk mereduksi emisi gas rumah kaca domestik dan menangkat emisi karbon serta kerja sama pada sektor energy bersih terbarukan dengan Tiongkok yang disepakati pada tahun 2014 di Beijing.

Pada masa pemerintahan Presiden Donald Trump asal Partai Republik, terjadi banyak perubahan kebijakan luar negeri Amerika Serikat yang bertolakbelakang dengan kebijakan pada era kepemimpinan sebelumnya, termasuk mengenai kebijakan baru terkait penarikan diri Amerika Serikat dari *Paris Agreement* 2015. Sebenarnya keputusan ini tidak begitu mengejutkan publik karena sejak masih dalam masa kampanye, Presiden Donald Trump memang telah menyinggung-nyinggung bahwa ia akan membawa AS meninggalkan kesepakatan tersebut. Hal tersebut didukung dengan tindakan yang eksplisit pada tanggal 1 Juni 2017, Donald Trump mengumumkan bahwa Amerika Serikat menarik diri dari Kesepakatan Paris 2015. Keputusan penarikan diri Amerika Serikat dari kesepakatan tersebut mendapat banyak kecaman dari berbagai pihak, di mana sebagian besar penentangannya adalah kalangan pendukung Partai Demokrat.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Ibid, 11.

<sup>5</sup> Op. cit.

Dalam pidatonya, Jumat (2/6/2017), seperti di lansir salah satu media internasional, CNN, Barack Obama juga sempat menyinggung keputusan terkait keluarnya Amerika Serikat dari kesepakatan tersebut. Ia mengatakan bahwa hingga saat ini, sektor swasta telah menerapkan sistem ramah lingkungan dengan mengurangi pembuangan karbon. Kesepakatan Paris tentu akan membuka peluang bisnis. Tak hanya itu para ilmuwan dan insinyur tentu akan menciptakan inovasi berteknologi tinggi untuk mengurangi pembuangan karbon dalam skala yang belum pernah tercipta sebelumnya.<sup>6</sup> Perjanjian tersebut juga dapat menjadi jembatan atas perbedaan negara maju dan negara berkembang.

AS menyumbang sekitar 17,89% dari rata-rata pembagian emisi karbon global yang meliputi 197 Pihak UNFCCC. Pada saat bersamaan merupakan sumber penting keuangan dan teknologi untuk negara-negara berkembang dalam upaya mengatasi peningkatan suhu. Apabila AS menarik diri dari *Paris Agreement*, tentunya ada konsekuensinya yang akan berimplikasi pada tujuan *Paris Agreement* itu sendiri, permasalahan pendanaan dan teknologi, maupun target penurunan temperature bumi. Berdasarkan komitmen dan ketentuan yang telah disepakati, *Paris Agreement* memang disepakati sejak tahun 2015, akan tetapi baru berkekuatan hukum pada November 2016. Dengan demikian, jika konsisten dengan ketentuan di pasal 28, maka AS baru dapat keluar dengan resmi paling cepat di November 2020. Kelemahan dari *Paris Agreement* ini adalah bahwa meskipun perjanjian tersebut bersifat mengikat bagi negara-negara tergabung, namun tidak ada instrument yang dapat

---

<sup>6</sup> Teddy Tri Setio Berty, “Obama Kritik Langkah AS Henggang dari Kesepakatan Iklim Paris”, diakses dari <http://global.liputan6.com/read/2974636/obama-kritik-langkah-as-henggang-dari-kesepakatan-iklim-paris> pada 7 Maret 2018 pukul 21.25

menjamin bahwa negara-negara tersebut akan memenuhi komitmen yang telah disepakati.<sup>7</sup>

Jika AS tidak ingin menunggu selama ketentuan waktu tersebut, maka opsi yang tersedia adalah AS keluar dari UNFCCC, yang berkekuatan hukum tetap (*entered into force*) pada 1994 di mana UNFCCC merupakan perjanjian internasional dalam perubahan iklim, yang menjadi payung Paris Agreement. Dalam pidatonya, Trump tidak menyinggung AS akan keluar dari UNFCCC, tetapi dia menyatakan akan menegosiasikan ulang bagaimana Amerika Serikat akan bergabung kembali (*reentered*) dengan *Paris Agreement*, atau dengan kesepakatan yang sama sekali baru. Hingga kini tidak jelas bagaimana bentuk kesepakatan baru yang akan dinegosiasikan Trump.<sup>8</sup>

### **1.2. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang yang diuraikan di atas, maka didapatkan rumusan masalah, yaitu:

Mengapa Presiden Donald Trump menarik Amerika Serikat keluar dari *Paris Agreement* pada tahun 2017?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Pengajuan proposal skripsi ini dilakukan guna mendapatkan persetujuan atas rancangan penelitian dan penulisan skripsi yang bertujuan untuk menjawab permasalahan dan pertanyaan mengenai alasan yang melatarbelakangi diambilnya keputusan Presiden Donald Trump yang menarik mundur AS dari *Paris Agreement* pada tahun 2017. Selain itu, penulisan ini juga dimaksudkan untuk mengetahui lebih jauh dan menjelaskan peran dan pengaruh

---

<sup>7</sup> Climate Analytics, “*Paris Agreement Ratification Tracker*”, diakses dari <https://climateanalytics.org/briefings/ratification-tracker/> pada 7 Maret 2018 pukul 19.16

<sup>8</sup> Fabby Tumiwa. “*Implikasi Keluarnya Amerika Serikat dari Paris Agreement terhadap Agenda Perubahan Iklim Global*”. Diakses dari <http://iesr.or.id/2017/06/implikasi-keluarnya-amerika-serikat-dari-paris-agreement-terhadap-agenda-perubahan-iklim-global/> pada 7 Maret 2018 pukul 21.23

partai berkuasa dalam pembuatan dan perubahan kebijakan politik AS.

#### **1.4. Kerangka Pemikiran**

Kerangka berfikir yang digunakan sebagai alat analisa untuk menjelaskan permasalahan penelitian yang kemudian akan membantu menata fakta dan data yang diteliti adalah Teori Peran (*Role Theory*) dalam Kebijakan Luar Negeri.

##### **1. Teori Peran**

Teori peran akan digunakan untuk menganalisis permasalahan yang diangkat terkait dengan konsepsi peran suatu negara dan pengambil keputusan serta korelasi antara analisis kebijakan luar negeri dengan system internasional. Secara umum, teori ini mengkaji mengenai karakteristik suatu agen atau actor terhadap karakteristik system yang ada dan sebaliknya, termasuk interaksi antar keduanya. Maka dari itu, penggunaan teori peran (*Role Theory*) dalam mengkaji permasalahan yang diangkat dianggap dapat menjelaskan mengenai perubahan kebijakan luar negeri Amerika Serikat pada masa pemerintahan Presiden Donald Trump terkait *Climate Change* dengan memahami perilaku individu maupun kelompok yang terlibat dalam pengambilan keputusan.

Teori peran (*Role Theory*) berasal dari berbagai bidang *study* yang berbeda, yakni disiplin ilmu sosiologi, psikologi, dan transdisiplin dari *social-psychology*. Teori peran pertama kali dikemukakan oleh K.J. Holsti melalui karyanya yang berjudul *National Role Conceptions in the Study of Foreign Policy* pada tahun 1970. Konsepsi peran yang dikemukakan oleh K.J. Holsti tersebut mengambil ide dari George Herbert Mead mengenai karakteristik atau perilaku seseorang dapat memengaruhi konsepsi individu yang berlandaskan pada konsepsi dari diri sendiri (ekspektasi diri) atau disebut dengan “ego” dan konsepsi yang berasal dari luar atau “alter”. Kebijakan luar negeri sebagai bentuk dari tindakan atau keputusan suatu negara di mana keputusan

tersebut dipengaruhi oleh adanya konsepsi peran “ego” dan preskripsi peran “alter” diikuti oleh status negara tersebut.<sup>9</sup>

Konsepsi peran “ego” meliputi pengaruh geografis atau lokasi, sumber daya yang dimiliki, kapabilitas, kebutuhan atau kepentingan dalam aspek ekonomi, nilai-nilai atau norma nasional yang berlaku, ideologi, peran tradisional, opini publik, personalitas, serta kepentingan atau kebutuhan politik. Sedangkan peran “alter” mencakup pengaruh dari system atau struktur negara, system nilai-nilai yang berkembang secara global, prinsip-prinsip umum yang resmi, komitmen terhadap kesekapatan atau perjanjian, pemahaman informal, dan opini, perspektif, atau pandangan dunia internasional. Teori ini merupakan teori yang menjelaskan mengenai perilaku individu dalam suatu struktur sosial yang kemudian digunakan untuk menjelaskan tingkah laku negara melalui analisis kebijakan luar negeri dan spesifik agen dari peran, tingkah laku, pengalaman, latar belakang atau sejarah, serta identitas diri sebagai bentuk representasi diri.

Holsti mengklasifikasikan analisis terhadap peran negara dipengaruhi oleh konsepsi peran itu sendiri, status negara, harapan maupun tuntutan peran dari negara lain. Konsepsi peran yang dikemukakan oleh Holsti, yakni: (1) *role performance*, merupakan perilaku atau tindakan suatu negara atau pemerintahan, (2) *national role conceptions*, yakni faktor internal atau ego sebagai pandangan suatu negara, (3) *role prescriptions*, meliputi harapan peran suatu negara dalam system internasional, (4) *position*, yang meliputi status nasional dari suatu negara.<sup>10</sup> *Role theory* menegaskan bahwa perilaku dalam menjalankan suatu peran politik disebut perilaku politik. Perilaku politik ini dipengaruhi atau terjadi karena adanya harapan atau tuntutan atas peran aktor politik tersebut di mana aktor diharapkan, dituntut, atau diduga akan berperilaku tertentu. Sedangkan harapan tersebut dapat bersumber dari orang lain terhadap pemegang peran tersebut

---

<sup>9</sup> Holsti, “*National Role Conceptions*”, 240

<sup>10</sup> Loc. cit.



atau bersumber dari persepsi atau sudut pandang dari aktor itu sendiri terhadap peran yang sedang dipegang.<sup>11</sup>

Menurut Cameron G. Thies, teori peran yang dipopulerkan oleh K.J. Holsti ini menjadi jembatan bagi berbagai perspektif dalam mengkaji disiplin ilmu politik luar negeri. Meskipun teori peran cenderung banyak menyentuh perspektif realis, namun juga mampu menyatukan perspektif liberalis dan konstruktivis.<sup>12</sup> Dalam memahami kebijakan luar negeri, teori peran dapat digunakan untuk mengamati berbagai level analisa, seperti individu, kelompok atau komunitas, institusi, negara, hingga organisasi internasional. Perilaku elemen dalam sebuah system yang lebih besar tersebut dapat disebut sebagai peran.<sup>13</sup> Michael Barnett menyebutkan bahwa level negara ini dapat diartikan sebagai pejabat pemerintahan atau actor-aktor institusional yang terlibat dalam pengambilan keputusan dalam suatu system sosial yang stabil sebagai entitas bersama.<sup>14</sup>

Berdasarkan Teori Peran (*Role Theory*) dalam Kebijakan Luar Negeri J.Holsti, penulis berusaha mengamati faktor-faktor dan situasi ego dan alter seperti apa yang mempengaruhi pengambilan keputusan tersebut. Penelitian ini akan berfokus pada analisis terhadap satu perilaku tertentu yang menjadi faktor utama diambilnya kebijakan tersebut, dikarenakan penelitian ini merujuk pada satu isu atau studi kasus yang spesifik, yakni alasan penarikan diri AS dari *Paris Agreement*.<sup>15</sup>

---

<sup>11</sup> Loc. cit.

<sup>12</sup> Cameron G. Thies, “*Role Theory and Foreign Policy*,” “*International Studies Association Compendium Project: Foreign Policy Analysis* (2009): 31-32, [http://www.isanet.org/compendium\\_sections/2007/06/foreign\\_policy\\_.html](http://www.isanet.org/compendium_sections/2007/06/foreign_policy_.html) diakses pada 14 Oktober 2018 pukul 16.22

<sup>13</sup> Agus Haryanto, “Prinsip Bebas Aktif Dalam Kebijakan Luar Negeri Indonesia: Perspektif Teori Peran”, *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi*, Volume IV No.II/ Desember 2014, hal 19

<sup>14</sup> Cameron G. Thies, 14.

<sup>15</sup> Op. cit.

Dalam kasus penarikan diri AS pada masa pemerintahan Presiden Donald Trump tahun 2017 dari *Paris Agreement*, dapat diamati bahwa pengaruh faktor-faktor internal memiliki pengaruh yang jauh lebih kuat daripada faktor-faktor eksternal. Berdasarkan klasifikasi dari konsepsi peran yang dijelaskan oleh J. Holsti, penulis akan berfokus pada dua indikator, yakni konsepsi peran Presiden Donald Trump itu sendiri dan faktor utama yang mempengaruhi pengambilan keputusannya serta kaitannya dengan status negara AS. Peran seorang actor utama sebagai pengambil kebijakan dalam perumusan kebijakan luar negeri tidak dapat berdiri sendiri, melainkan didukung oleh pihak atau kelompok yang memiliki peran lain yang berhubungan erat dengan actor tersebut, di mana keberadaan dari actor lain yang mempengaruhi pelaku peran akan membangun kesadaran akan posisi atau kedudukan pelaku peran dalam suatu tatanan sosial. Oleh karena itu, pelaku peran akan berusaha untuk membangun citra diri yang akan membentuk persepsi “sejalan” atau “sepihak” didalam struktur sosial tersebut.

Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh J. Holsti mengenai klasifikasi peran negara yang dipengaruhi oleh konsepsi peran itu sendiri yang dilihat dari latar belakang Presiden Donald Trump sebagai seorang pebisnis atau pengusaha yang memiliki indikasi bahwa ia memiliki orientasi ekonomi lebih tinggi daripada Obama kemudian didukung oleh faktor lain yang sangat kuat dalam mempengaruhi perubahan kebijakan luar negeri AS. Salah satu faktor dominan yang mempengaruhi perubahan kebijakan luar negeri AS adalah platform partai asal presiden atau partai berkuasa yang memiliki kursi mayoritas di Kongres dan Senat AS. AS memiliki dua partai dominan yakni Partai Demokrat dan Partai Republik.

Platform lebih merupakan garis besar dari prinsip dan keyakinan partai dibandingkan suatu bentuk kebijakan yang mengikat. Perbedaan platform dari partai utama AS yakni Partai Republik dan Partai Demokrat menjadi faktor yang mempengaruhi terjadinya perubahan kebijakan politik AS

dalam berbagai isu di mana kedua partai memiliki orientasi politik yang berlawanan dalam sejumlah isu seperti pajak, peran pemerintah, hak jaminan sosial dan perawatan kesehatan, kontrol senjata, imigrasi, aborsi, kebijakan dan regulasi lingkungan, sikap dalam isu militer, pernikahan sesama jenis, hukuman mati, minimum upah, dan kebijakan luar negeri.

Partai Demokrat meliputi kaum liberal dan bersifat terbuka akan adanya perubahan-perubahan dan prinsip kebebasan. Kaum liberal juga merupakan kalangan yang sangat *vocal* dalam menyerukan dan mendukung nilai-nilai HAM, memperjuangkan kalangan minoritas dan menentang ke bawah seperti kebijakan pajak yang berbeda berdasarkan kelas ekonomi dan sosial masyarakat, isu LGBT, anti-rasisme, hak aborsi, penentangan terhadap hukuman mati maupun pernikahan sesama jenis yang dianggap sebagai bagian dari kebebasan atau hak individu manusia.<sup>16</sup> Partai Republik dikuasai oleh golongan konservatif yang dikenal sebagai kalangan yang agamis atau *religious* dan menjunjung tinggi nilai-nilai tradisional dan probisnis di mana sebagian besar pendukungnya berasal dari kalangan pengusaha dan profesional sehingga memiliki pandangan dan hasil kebijakan yang sangat berbeda dengan kaum liberal dari Demokrat.

Perbedaan platform paling jelas terlihat dalam pandangan kedua partai mengenai isu energi dan perubahan iklim. Perbedaan mencolok ini terlihat dari sikap kedua partai dalam *Paris Agreement* di mana Partai Demokrat mendukung agenda ini bahkan menjadikannya agenda utama dalam agenda perubahan iklim oleh Obama, namun ditolak oleh Partai Republik. Dapat difahami dari pola kebijakan pada masa kepemimpinan presiden dari kedua partai tersebut bertolakbelakang, utamanya dalam kebijakan lingkungan dan perubahan iklim. Dukungan politik dari partai berkuasa

---

<sup>16</sup> The Democrat Platform Committee, “2016 Democratic Party Platform”, July 8-9, 2016 – Orlando, FL

menjadi faktor dominan pembuatan keputusan oleh pembuat keputusan.

Kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Presiden Donald Trump dari Partai Republik tersebut dapat difahami melalui rekam jejak kepemimpinan pendahulunya George H W Bush dan George W Bush yang juga berasal dari partai yang sama memiliki pola kebijakan yang serupa. Pada masa pemerintahan George H W Bush, ia mendukung beberapa kebijakan lingkungan. Pencapaian terbesar adalah mensponsori amandemen penting dalam Clean Air Act 1970. Lebih daripada itu, George H W Bush dinilai cacat karena penolakannya terhadap program untuk menstabilkan emisi gas rumah kaca dalam tindakan apapun. Meskipun George H W Bush berasal dari Partai Republik, namun parlemen AS pada masa itu dikuasai oleh Partai Demokrat di mana hal ini sangat berpengaruh terhadap pembuatan kebijakan pada masa pemerintahan Bush.

AS pada masa kepemimpinan Bill Clinton dari Partai Demokrat membuat terobosan baru dalam perubahan iklim setelah sebelumnya AS tidak pernah melakukan aksi atau upaya stabilisasi emisi gas rumah kaca, terlebih lagi kebijakan dalam skala internasional. Dalam kebijakan Kongres AS yang disahkan pada tahun 1997, AS menolak untuk turut ambil andil dalam Protokol Kyoto. Namun, setelah perundingan yang panjang dan rumit, akhirnya AS menyetujui Protokol Kyoto di bawah kepemimpinan Bill Clinton pada COP4 pada tahun 1998. Dalam Resolusi Byrd-Hagel yang dirilis 1997, Senat AS menganggap Protokol Kyoto dapat membawa kemunduran bagi perekonomian AS. Pada masa pemerintahan George W Bush dari Partai Republik, upaya-upaya dukungan terhadap perubahan lingkungan pada masa kepemimpinan Bill Clinton benar-benar ditolak. Hingga pada 29 Maret 2001, Presiden Bush menarik AS keluar dari Protokol Kyoto.

Pada masa kepemimpina Presiden Barack Obama yang berasal dari Partai Demokrat, isu lingkungan diangkat menjadi salah satu agenda utama dalam Administrasi Obama. Berbeda dengan Republik, Demokrat memahami bahwa isu perubahan

iklim adalah ancaman yang nyata. Meskipun Kongres masih dikuasai oleh Partai Republik, namun Demokrat tetap mayoritas di Senat AS meskipun juga kehilangan sejumlah kursi. Obama kemudian meneruskan upaya Clinton atas gagalnya AS dalam Protokol Kyoto dengan menyetujui dan meratifikasi Perjanjian Iklim 2015 sebagai tindak lanjut dari Protokol Kyoto 1997 meskipun mendapat pertentangan dari Kongres AS.

Pada masa kepemimpinan Trump, Republik masih unggul menguasai Kongres AS. Pada masa kampanye, Trump sudah menegaskan sikap skeptisnya terhadap perubahan iklim atau pemanasan global seperti halnya kubu republican. Trump menganggap pemanasan global adalah tipu muslihat Tiongkok untuk merugikan ekonomi AS dan hal tersebut berhasil mempengaruhi pendukung Partai Republik. Trump memerintahkan untuk meninjau kembali sejumlah kebijakan lingkungan dan perubahan iklim Obama, seperti *Energy Independence Executive Order* dan *Clean Power Plan*.

Jika dilihat berdasarkan rekam jejak presiden asal Partai Republik dan bagaimana platform Partai Republik mempengaruhi perilaku dan tindakan dari pembuat kebijakan, artinya mereka memiliki pemahaman kolektif yang berkembang dalam kelompok Partai Republik terhadap wacana *climate change* terutama dalam isu gas emisi karbon yang hanya akan menyebabkan kemunduran bagi perekonomian AS mengingat platform Partai Republik sangat memperhatikan peningkatan produksi dan ekspor energy sebagai eksportir energy utama di dunia sekaligus negara dengan cadangan batubara terbesar di dunia serta posisi AS sebagai negara industri modern yang sangat mengandalkan bakar bakar fosil sebagai bahan bakar dasar dalam kebutuhan energy yang digunakan dalam setiap aktifitas industri modern, terutama batubara, minyak, dan gas alam.. Dilihat dari perilaku pendahulunya dari Partai Republik, maka perilaku Trump diprediksi akan mengikuti atau sama dengan perilaku para pendahulunya dalam membuat kebijakan sejalan dengan platform Partai Republik.

### **1.5. Hipotesis**

Dari permasalahan yang dibahas mengacu pada kerangka berfikir yang digunakan, maka kesimpulan sementara penulis adalah perilaku politik Donald Trump dalam *Paris Agreement* dipengaruhi oleh skeptisme platform Partai Republik terhadap isu perubahan iklim.

#### **1.6. Jangkauan Penelitian**

Jangkauan penelitian dalam sebuah penelitian adalah hal yang penting. Pembatasan akan persoalan yang akan dibahas dimaksudkan untuk membantu penulis agar supaya jangkauan penelitian tidak sampai keluar dari kajian penelitian sehingga membuat pembahasan penelitian menjadi tidak spesifik dan memiliki ruang lingkup yang terlalu luas. Dengan adanya jangkauan penelitian, maka pemetaan fakta dan data yang hendak dicari akan tersusun secara terstruktur dan memiliki cakupan yang jelas.

Penulis akan menjelaskan jangkauan penelitian dengan pembahasan mengenai perubahan kebijakan AS dalam lingkup kajian politik lingkungan global. Penelitian ini dibatasi peran dan platform Partai Republik dalam perubahan kebijakan iklim AS pada masa pemerintahan Donald Trump terhadap *Paris Agreement* 2015 dengan periode penelitian tahun 2017. Penelitian ini juga akan dikorelasikan dengan peran Partai Republik dalam mempengaruhi kebijakan iklim AS untuk menjelaskan alasan yang melatarbelakangi keputusan Presiden Donald Trump dalam menarik mundur AS dari *Paris Agreement* pada tahun 2017.

#### **1.7. Metodologi Penelitian**

##### **2. Variabel Penelitian dan Level Analisa**

Variabel penelitian dan level analisa yang penulis gunakan ada dua yakni variable dependen (unit analisa) dan variable independen (unit eksplanasi). Unit analisa merupakan suatu perilaku atau fenomena yang hendak diamati yakni keputusan Presiden dalam *Paris Agreement* pada tahun 2017. Sedangkan, unit eksplanasinya terkait dengan *Paris Agreement* itu sendiri.

##### **3. Jenis Penelitian dan Jenis Data**

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode penelitian kualitatif (deskriptif). Melalui metode ini, penulis akan lebih mudah dalam hal pemetaan data-data, fakta-fakta, dan hubungan antar fenomena dan variable yang ditemukan dalam penelitian. Sedangkan, terkait data yang digunakan adalah data sekunder di mana data tersebut tidak secara langsung penulis peroleh, namun berasal dari media-media perantara yang diperoleh dan dicatat oleh pihak lain yang terverifikasi valid.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian adalah studi kepustakaan. Sumber-sumber data yang digunakan meliputi berbagai literature yang berkaitan dengan cakupan dan data yang dibutuhkan dalam penelitian. Data tersebut dapat di peroleh dari buku, jurnal, surat kabar, hasil konferensi atau diskusi ilmiah, dan artikel-artikel yang bersumber dari sumber data yang valid seperti lembaga pemerintahan, lembaga-lembaga riset, organisasi internasional, dan media informasi resmi yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penelitian.